

PERAN VISI DALAM PEMBENTUKAN KEBIJAKAN POLITIK MODERN

Kusuma Dewi Astuti^{1*}

^{1*} Universitas PGRI Adi Buana Surabaya, Surabaya, Indonesia

kusumadewias0402@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History:

Received: 2025-09-28

Revised: 2025-10-15

Accepted: 2025-10-25

Keyword:

Political Vision;

Modern Policy;

Policy Formulation;

Qualitative Approach.

ABSTRACT (English)

Vision in modern politics is a crucial component that underpins policy direction and addresses the challenges of democracy, globalization, and contemporary dynamics. This study explores the relationship between political vision and modern policy formation, emphasizing its importance to policy quality. It aims to analyze the role of vision in policy formulation, offering theoretical and practical perspectives. This study uses a qualitative approach with descriptive methods to explore the relationship between vision and policy in the context of modern politics. The results indicate that vision plays a crucial role as a conceptual guide in policy formulation. Vision provides long-term direction that serves as the basis for harmonious and consistent policymaking.

How to Cite:

Astuti, K. D. (2025). PERAN VISI DALAM PEMBENTUKAN KEBIJAKAN POLITIK MODERN. *Cabinet: Journal of Social, Politics and Government*, 1(1), 9-15. <https://doi.org>.



[https://doi.org/](https://doi.org)

This is an open access article under the CC-BY license



INTRODUCTION

Visi dalam politik modern merupakan komponen penting yang menjadi landasan arah kebijakan dan menjawab tantangan demokrasi, globalisasi, dan dinamika kontemporer. Visi politik berfungsi sebagai peta jalan yang menentukan arah suatu bangsa, memastikan arah pembangunan dan keputusan pemerintah konsisten dengan tujuan strategis demi kebaikan bersama. Visi juga berfungsi sebagai acuan pengambilan keputusan, yang memungkinkan partai politik dan pemerintah untuk memprioritaskan isu, mengelola sumber daya, dan mengutamakan kepentingan rakyat.

Visi politik yang jelas memudahkan partai dalam membangun koalisi, menggalang dukungan, dan menyelaraskan berbagai kepentingan. Visi juga

mengedukasi publik tentang cita-cita bersama dan pentingnya partisipasi dalam proses politik. Dalam konteks demokrasi, visi politik memperkuat kepercayaan publik terhadap partai dan pemimpin, mendorong partisipasi publik, dan mencegah tindakan populis yang melemahkan lembaga demokrasi.

Di era globalisasi dan tantangan kontemporer, visi politik perlu adaptif dan responsif, mengadaptasi kebijakan dengan standar internasional tanpa kehilangan identitas nasional. Visi politik merupakan instrumen untuk menjaga integritas, kedaulatan, dan daya saing nasional, termasuk mengatasi tantangan ketimpangan, polarisasi, dan eksklusi sosial yang sering muncul akibat globalisasi.

Beberapa studi telah menyoroti pentingnya visi dalam politik, terutama sebagai dasar arah kebijakan dan relevansinya dalam demokrasi. Penelitian Rusdiono (2016) menemukan bahwa visi dan misi calon kepala daerah seringkali dikemas dengan isu-isu lokal agar mudah diterima oleh pemilih dan harus selaras dengan dokumen perencanaan jangka panjang daerah (RPJPD). Menilai keselarasan visi dan misi calon dengan RPJPD sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan.

Visi juga merupakan kunci perubahan strategis, karena berfungsi sebagai dasar perumusan strategi, termasuk perumusan dan implementasi kebijakan politik dan pemerintahan. Partai politik memainkan peran sentral dalam menyerap, menghimpun, dan menyalurkan aspirasi publik menjadi kebijakan publik. Sebuah studi empiris di Sulawesi Barat menunjukkan korelasi yang jelas antara visi dan misi calon dengan tingkat popularitas dan elektabilitasnya di masyarakat.

Visi partai dan keselarasan dengan nilai-nilai kebangsaan juga merupakan aspek penting dari visi politik. Sebuah studi terhadap Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyimpulkan bahwa visi dan misi partai politik baru harus tetap selaras dengan cita-cita dan dasar negara (NKRI), meskipun perbedaan interpretasi dapat muncul dalam implementasi kebijakan.

Berdasarkan hal itu, visi politik bukan sekadar formalitas administratif, tetapi memainkan peran vital dalam menentukan arah kebijakan, strategi pembangunan, dan memperkuat legitimasi demokrasi dalam masyarakat yang dinamis. Penelitian ini mengeksplorasi hubungan antara visi politik dan pembentukan kebijakan modern, menekankan pentingnya visi dalam kualitas kebijakan. Yang bertujuan untuk menganalisis peran visi dalam perumusan kebijakan, menawarkan perspektif teoretis dan praktis.

METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk mengeksplorasi hubungan antara visi dan kebijakan dalam konteks politik modern. Data sekunder dikumpulkan dari studi literatur, dokumen kebijakan, laporan resmi pemerintah, dan sumber lainnya. Studi dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari dokumen kebijakan nasional, visi

pembangunan, dan literatur akademis. Data dianalisis menggunakan analisis isi, dengan mengidentifikasi dan mengkategorikan informasi relevan tentang visi, perannya dalam pembentukan kebijakan, hubungan antara visi dan kebijakan politik, serta tantangan dalam implementasinya. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang hubungan antara visi dan kebijakan dalam konteks politik modern.

RESULT AND DISCUSSION

Hubungan Visi dan Kebijakan

Hubungan antara visi dan kebijakan dalam konteks politik modern sangatlah berpengaruh. Visi adalah tujuan jangka panjang yang diinginkan oleh pemerintah, partai politik, atau lembaga negara, yang memberikan arahan dan kerangka kerja bagi perumusan kebijakan. Kebijakan adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan tertentu, menjadikan visi sebagai cara yang konkret dan praktis untuk mewujudkannya. Dalam sistem politik modern, para pembuat kebijakan menggunakan visi sebagai panduan utama dalam menentukan prioritas, strategi, dan langkah-langkah tindakan. Kebijakan yang selaras dengan visi mendapatkan dukungan publik yang lebih kuat, karena dianggap mencerminkan cita-cita dan aspirasi bersama.

Dalam kerangka pembangunan nasional, visi pembangunan nasional, seperti Visi Indonesia 2045, berfungsi sebagai dasar bagi pembentukan kebijakan sektoral terpadu yang mendukung tujuan-tujuan nasional utama seperti kemajuan ekonomi, kualitas sumber daya manusia, dan ketahanan teknologi. Hubungan antara visi dan kebijakan bersifat simbiosis, karena visi mendefinisikan "apa" yang ingin dicapai, sementara kebijakan mendefinisikan "bagaimana" mencapainya. Keduanya harus bekerja secara harmonis agar tujuan politik dan pembangunan dapat terwujud secara efektif dan berkelanjutan. Hubungan antara visi yang dibuat dan kebijakan yang diterapkan adalah sebagai berikut:

1. Visi sebagai Panduan Konseptual

Visi memberikan gambaran ideal tentang tujuan jangka panjang yang ingin dicapai oleh suatu pemerintahan atau organisasi politik. Visi ini berfungsi sebagai kompas yang mengarahkan setiap langkah kebijakan agar tetap pada jalur yang telah ditentukan secara konseptual.

2. Kebijakan sebagai Implementasi Praktis

Kebijakan adalah bentuk nyata dari visi yang diterjemahkan ke dalam program, regulasi, dan tindakan konkret. Kebijakan yang dirumuskan harus konsisten dengan visi agar pencapaian tujuan menjadi terarah dan terukur.

3. Proses Translasi Visi ke Kebijakan

Dalam praktik, visi biasanya diterjemahkan ke dalam misi, strategi, dan rencana kerja yang lebih spesifik. Dari sini, kebijakan dibuat sebagai instrumen eksekusi yang menangani isu-isu konkret sesuai konteks sosial-politik, anggaran, dan sumber daya yang tersedia.

4. Fleksibilitas dan Adaptasi

Meskipun kebijakan harus selaras dengan visi, dalam praktik sering terjadi penyesuaian kebijakan untuk menghadapi dinamika politik, toleransi terhadap kondisi praktis, maupun perubahan situasi global dan domestik. Namun, penyesuaian ini tetap harus mempertahankan esensi visi utama agar tidak kehilangan arah.

5. Evaluasi Berbasis Visi

Keberhasilan kebijakan diukur berdasarkan seberapa efektif kebijakan tersebut membawa pencapaian visi. Evaluasi terus-menerus menjadi bagian penting untuk memastikan konsistensi antara visi dan kebijakan, serta untuk melakukan koreksi jika dibutuhkan.

Peran Visi dalam Pembentukan Kebijakan Politik Modern

Peran visi dalam kebijakan politik modern sangat krusial karena menjadi landasan bagi perumusan dan implementasi kebijakan publik. Visi yang jelas menetapkan visi jangka panjang tentang tujuan dan arah pembangunan suatu negara, memastikan pembangunan yang konsisten dan terarah. Visi menghubungkan aspirasi publik dan kebijakan, menjadikan kebijakan lebih representatif dan akuntabel kepada rakyat.

Aplikasi visual dalam pembentukan kebijakan menghadirkan konsistensi dan koherensi pada keseluruhan grafik kebijakan pemerintah, mencegah tumpang tindih atau kontradiktif antarsektor. Visi juga menjadi tolok ukur untuk mengukur keberhasilan dan efektivitas kebijakan yang telah diimplementasikan, sehingga memungkinkan adanya kritik dan perbaikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Visi yang jelas dalam partai atau pemerintahan mendorong rekrutmen kader politik yang berkualitas dan berorientasi pada tujuan jangka panjang, sehingga mendorong tata kelola pemerintahan yang efektif dan kompeten. Dalam dunia yang dinamis, visi politik modern harus adaptif dan responsif terhadap isu-isu global seperti ketimpangan sosial, perubahan iklim, dan teknologi. Kebijakan yang dirumuskan harus menjawab tantangan-tantangan ini, yang dilandasi oleh visi yang kuat dan relevan. Berikut peran visi dalam pembentukan kebijakan politik modern:

1. Sebagai Arah dan Orientasi

Visi memberikan gambaran jangka panjang yang jelas sebagai pedoman dalam menetapkan prioritas kebijakan. Dengan visi, kebijakan yang dibuat bersifat terarah, konsisten, dan tidak hanya fokus pada solusi jangka pendek atau reaktif terhadap isu sesaat. Visi memastikan setiap kebijakan selaras dengan tujuan besar yang ingin dicapai oleh pemerintahan atau partai politik.

2. Sebagai Legitimasi Politik

Visi digunakan untuk memperoleh dan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah atau aktor politik. Visi yang realistis dan mengakomodasi aspirasi rakyat memberikan dasar moral serta politik, sehingga kebijakan yang dijalankan mendapat dukungan dan legitimasi yang kuat dari masyarakat. Legitimasi ini penting untuk stabilitas politik dan efektivitas pelaksanaan kebijakan.

3. Sebagai Landasan Strategis

Visi menjadi fondasi utama dalam merancang dan melaksanakan strategi pembangunan nasional maupun daerah. Visi menetapkan kondisi ideal yang ingin dicapai, sehingga strategi kebijakan dan program pembangunan dapat terintegrasi dengan baik, terkoordinasi, dan berjalan konsisten demi mencapai tujuan tersebut.

4. Sebagai Alat Konsolidasi

Visi memiliki fungsi menyatukan berbagai aktor politik, birokrasi, dan masyarakat dalam kerangka tujuan bersama. Dengan visi yang inklusif dan komunikatif, perbedaan kepentingan bisa diredam, mendorong kerja sama dan partisipasi kolektif untuk mewujudkan cita-cita bersama. Hal ini memperkuat koordinasi dan dukungan bagi pelaksanaan kebijakan.

5. Sebagai Faktor Diferensiasi

Visi membedakan satu aktor atau pemimpin politik dengan yang lain dalam merumuskan kebijakan. Visi yang unik dan menonjol mencerminkan karakter, nilai, serta arah politik yang khas dari seorang pemimpin atau partai, sehingga menjadi identitas politik yang membedakan mereka di mata publik dan pemangku kepentingan. Faktor diferensiasi ini penting dalam persaingan politik dan dalam menarik dukungan masyarakat.

Tantangan dan Dinamika Implementasi Visi dalam Kebijakan Politik Modern

Implementasi visi dalam kebijakan politik modern merupakan proses kompleks yang melibatkan berbagai faktor yang saling terkait. Faktor-faktor

tersebut meliputi keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, lemahnya koordinasi antarlembaga, pengaruh dan intervensi politik, dinamika sosial dan politik yang berubah cepat, korupsi dan konflik kepentingan, penolakan dan keraguan publik, serta rendahnya kualitas perencanaan.

Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran merupakan hambatan utama bagi kualitas perencanaan dan implementasi kebijakan yang selaras dengan visi yang telah ditetapkan. Sinkronisasi dan komunikasi yang buruk antara berbagai lembaga dan aktor politik dapat menyebabkan tumpang tindih, kebingungan, dan kontradiksi dalam implementasi kebijakan. Intervensi politik dalam birokrasi dan pengambilan keputusan sering terjadi, terutama selama pemilu atau perebutan kekuasaan, yang dapat menggeser fokus kebijakan dari visi jangka panjang ke kepentingan jangka pendek, sehingga mengurangi konsistensi dan keberlanjutan.

Dinamika sosial dan politik yang berubah cepat, seperti perubahan sosial, tekanan dari berbagai kelompok kepentingan, dan globalisasi, mengharuskan pemerintah untuk terus beradaptasi, sehingga sulit untuk mempertahankan visi yang telah ditetapkan secara konsisten. Korupsi dan persaingan kepentingan politik menimbulkan hambatan serius dalam mewujudkan visi politik, karena praktik korupsi dapat menggerogoti sumber daya dan memengaruhi keputusan politik.

Ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah dan rendahnya partisipasi publik dalam proses pembuatan kebijakan juga dapat menghambat implementasi efektif suatu visi. Desain kebijakan yang kurang transparan dan minimnya konsultasi publik memperkuat resistensi ini. Berdasarkan hal itu, implementasi suatu visi dalam kebijakan politik modern menghadapi berbagai tantangan struktural, politik, sosial, dan budaya yang harus diatasi melalui strategi pengelolaan sumber daya, pengembangan kapasitas, koordinasi yang lebih baik, serta membangun kepercayaan dan partisipasi publik yang kuat.

CONCLUSION

Visi dan kebijakan memiliki hubungan yang sangat erat dan saling melengkapi dalam konteks politik modern. Visi berfungsi sebagai arah jangka panjang yang memberikan panduan konseptual dan landasan strategis bagi pembentukan kebijakan. Kebijakan merupakan implementasi praktis yang menerjemahkan visi ke dalam program dan tindakan nyata agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai secara efektif dan terukur. Visi yang jelas dan kuat juga berperan dalam memberikan legitimasi politik, mengkonsolidasikan berbagai aktor politik, serta membedakan karakter dan arah politik suatu pemerintahan atau

partai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa visi memegang peranan penting sebagai panduan konseptual dalam perumusan kebijakan. Visi memberikan arah jangka panjang yang menjadi dasar bagi pembuatan kebijakan yang selaras dan konsisten. Kebijakan yang dibuat berfungsi sebagai implementasi praktis dari visi tersebut, diterjemahkan dalam bentuk program dan regulasi konkret yang diarahkan pada pencapaian tujuan visi. Penelitian juga menemukan bahwa proses translasi visi ke kebijakan melibatkan tahap misi, strategi, dan rencana kerja yang harus disesuaikan dengan dinamika sosial-politik dan sumber daya yang tersedia. Fleksibilitas dalam penyesuaian kebijakan tetap harus menjaga esensi visi agar tujuan jangka panjang tidak tergeser oleh perubahan situasi.

REFERENCES

- Adriansah, A. (2021). *Peran Politik Muhammad bin Salman dalam modernisasi menuju visi 2030 arab saudi* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Hidayatuddin, H., & Jamba, P. (2024). Peran Partai Politik Terhadap Pembentukan Kebijakan Publik. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(6), 9045-9057.
- Iskandar, D. J. (2017). Pentingnya partisipasi dan peranan kelembagaan politik dalam proses pembuatan kebijakan publik. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 14(1), 17-35.
- Khamim, S., Iswantir, I., Siregar, N., & Yaldi, Y. (2024). Pengaruh dan tantangan pendidikan agama Islam dalam dinamika politik di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(2), 2027-2042.
- Nasution, A. R. S. (2019). *Peran Kebijakan Kepala Madrasah Dalam Implementasi Visi Misi Madrasah Aliyah Swasta Pondok Pesantren Modern Nurul Hakim Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Solichin, M. (2015). Implementasi kebijakan pendidikan dan peran birokrasi.